

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan sektor strategis dalam pembangunan ekonomi daerah karena berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kontribusinya tidak hanya mencakup peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga mendorong pertumbuhan UMKM, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Aktivitas pariwisata yang berkembang turut meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak, retribusi, dan sektor pendukung seperti perhotelan, kuliner, transportasi, serta industri kreatif (Onibala et al., 2024). Purnamawati & Hatane (2024) menekankan bahwa pengembangan desa wisata berbasis ekowisata harus berlandaskan prinsip tata kelola kolaboratif, meliputi transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab bersama, agar mampu menciptakan keseimbangan antara konservasi lingkungan, pelestarian budaya, dan kesejahteraan masyarakat. Penegasan pentingnya tata kelola kolaboratif juga terdapat dalam temuan Akbar et al (2022) yang menunjukkan bahwa kolaborasi antarpemangku kepentingan dimulai dari dialog tatap muka dan ditopang desain kelembagaan serta kepemimpinan fasilitatif mampu mengisi keterbatasan kapasitas pemerintah dalam pengembangan desa wisata dan menambah nilai ekonomi bagi komunitas lokal.

Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menunjukkan bahwa kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 4,01% pada semester I tahun 2024, naik dari 3,9% pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini mengindikasikan pemulihan dan pertumbuhan

pariwisata pascapandemi, didorong oleh pemulihan perjalanan, meningkatnya jumlah wisatawan domestik dan mancanegara, serta penguatan program desa wisata. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun internasional, memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Sektor pariwisata diperkirakan menyumbang devisa sebesar 16,7 miliar dolar AS, tumbuh 19,3% dibandingkan 2023. Selain itu, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional pada 2024 diestimasikan mencapai 4,01-4,5% (Kemenparekraf/Baparekraf RI, 2025), menunjukkan bahwa sektor ini mulai mendekati tingkat pemulihan penuh. Sumber devisa berasal dari pengeluaran wisatawan asing untuk akomodasi, kuliner, transportasi, dan wisata belanja. Capaian ini memperkuat posisi sebagai destinasi unggulan di Asia Tenggara, terutama dengan berkembangnya pariwisata berkelanjutan dan wisata berbasis pengalaman lokal. Sejalan dengan itu, literatur tata kelola pariwisata-desa menegaskan bahwa keberlanjutan (*sustainability*) dan daya saing destinasi membutuhkan jaringan kolaborasi lintas-aktor (*good tourism governance*), bukan hanya intervensi top-down pemerintah semata (Matthoriq et al., 2021).

Pengelolaan pariwisata di tingkat daerah mencakup dua aspek utama, yaitu daya tarik wisata dan pengalaman pengunjung. Mengacu pada UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, daya tarik wisata meliputi keunikan, keindahan, dan nilai yang berasal dari keanekaragaman alam, budaya, serta hasil kreativitas manusia. Pengelolaan pariwisata tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan jumlah wisatawan, tetapi juga untuk mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan melalui pendekatan yang menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Salah satu bentuk pengembangan yang menonjol adalah desa wisata,

yang tidak hanya berfungsi sebagai destinasi rekreasi, tetapi juga sebagai sarana pelestarian budaya dan pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Bukti empirik dari studi Nglanggeran menunjukkan bahwa ketika lima proses kolaborasi oleh Ansell & Gash (dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen pada proses, pemahaman bersama, dan hasil antara) dijalankan konsisten, manfaat sosial-ekonomi bagi komunitas meningkat signifikan; namun tantangan pemerataan manfaat dan kapasitas SDM tetap perlu dikelola (Maulia & Setiyono, 2023).

Pemerintah menunjukkan komitmen terhadap pengembangan desa wisata melalui berbagai kebijakan, seperti Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata. Desa wisata juga berperan penting dalam pelestarian lingkungan dan kebudayaan melalui pendekatan ekowisata dan wisata edukatif, yang memungkinkan wisatawan memahami nilai-nilai budaya dan keanekaragaman hayati setempat. Pengelolaan dilakukan secara sinergis antara pengelola lokal, pemerintah daerah, dan sektor swasta dengan prinsip integrasi dan koordinasi. Kerangka *good tourism governance* memperjelas bahwa koordinasi program antar-pemangku kepentingan dan partisipasi aktif masyarakat merupakan inti penyelenggaraan kepariwisataan yang baik (Matthoriq et al., 2021).

Tren pengembangan desa wisata menunjukkan peningkatan signifikan sebagai bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Desa wisata menjadi solusi bagi wilayah pedesaan dalam mengembangkan sektor pariwisata secara mandiri, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pergeseran preferensi wisatawan, khususnya generasi

milennial, mendorong minat terhadap pengalaman berbasis budaya, alam, dan interaksi sosial dengan komunitas lokal. Data Jejaring Desa Wisata (Jadesta) per 21 Oktober 2024 mencatat sebanyak 6.026 desa wisata tersebar di berbagai provinsi, terdiri atas 4.687 desa wisata rintisan, 992 desa wisata berkembang, 314 desa wisata maju, dan 33 desa wisata mandiri. Di sisi lain, literatur kolaborasi di sektor pariwisata juga menekankan pentingnya digitalisasi sebagai pengungkit promosi, pelayanan, dan pemasaran destinasi yang terbukti di Nglanggeran mampu menciptakan lapangan kerja baru, menaikkan kunjungan, serta memperluas jangkauan pemasaran (Maulia & Setiyono, 2023).



Gambar 1. 1 Grafik Provinsi Dengan Wisata Terbanyak Tahun 2024

Sumber : Jadesta (Jejaring Desa Wisata) 2024

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah desa wisata terbanyak di Pulau Jawa, yakni 603 desa yang terdiri atas 461 desa rintisan, 77 berkembang, 60 maju, dan 5 mandiri. Jawa Tengah berada di peringkat kedua dengan 511 desa wisata, didominasi oleh 404 desa rintisan, 81 berkembang, 30 maju, dan hanya 1 desa mandiri. Jawa Barat memiliki 469 desa

wisata, dengan 383 desa rintisan, 68 berkembang, 18 maju, dan belum memiliki desa wisata mandiri. Jumlah desa wisata di Jawa Tengah tergolong besar, namun tingkat perkembangannya tertinggal dibandingkan Jawa Timur. Mayoritas desa wisata di Jawa Tengah masih berada pada tahap awal dan belum menunjukkan kemajuan signifikan menuju status mandiri. Keterbatasan infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, serta lemahnya dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penghambat utama. Imtiyaza et al (2024) menegaskan bahwa kualitas kolaborasi, terutama pada aspek dialog tatap muka, kepercayaan, dan komitmen proses, sering menjadi faktor penentu percepatan perkembangan destinasi.

Jawa Tengah sendiri, pengembangan desa wisata terus mengalami pertumbuhan dengan total 511 desa wisata yang tersebar di berbagai kabupaten. Setiap daerah memiliki potensi dan karakteristik wisata yang beragam, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Berikut adalah jumlah desa wisata di masing-masing kabupaten di Jawa Tengah berdasarkan data Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tahun 2024.

1. **Tinggi:** ≥ 40 desa wisata
2. **Menengah:** 30–39 desa wisata
3. **Sedang:** 20–29 desa wisata
4. **Rendah:** < 20 desa wisata

Tabel 1. 1 Data Jumlah Desa Wisata Kabupaten Di Jawa Tengah Tahun 2024

NO.	KABUPATEN	JUMLAH DESA WISATA	CLUSTER
1.	KAB SEMARANG	80	Tinggi
2.	WONOSOBO	58	Tinggi
3.	PURWOREJO	54	Tinggi
4.	BOYOLALI	46	Tinggi
5.	KAB MAGELANG	45	Tinggi
6.	KLATEN	39	Tinggi

NO.	KABUPATEN	JUMLAH DESA WISATA	CLUSTER
7.	PEMALANG	36	Menengah
8.	GROBOGAN	33	Menengah
9.	BATANG	32	Menengah
10.	KARANGANYAR	31	Menengah
11.	CILACAP	30	Menengah
12.	KUDUS	30	Menengah
13.	TEMANGGUNG	30	Menengah
14.	KEBUMEN	29	Sedang
15.	PURBALINGGA	28	Sedang
16.	REMBANG	28	Sedang
17.	BANJARNEGARA	26	Sedang
18.	JEPARA	24	Sedang
19.	KAB PEKALONGAN	23	Sedang
20.	PATI	22	Sedang
21.	DEMAK	21	Rendah
22.	KENDAL	21	Rendah
23.	BANYUMAS	19	Rendah
24.	SUKOHARJO	19	Rendah
25.	KAB TEGAL	18	Rendah
26.	BLORA	18	Rendah
27.	BREBES	14	Rendah
28.	SRAGEN	6	Rendah
29.	WONOGIRI	6	Rendah

Sumber : DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah(2025)

Tabel 1.1, Kabupaten Blora berada dalam klaster rendah pengembangan desa wisata dengan jumlah hanya 18 desa. Jumlah ini jauh tertinggal dibandingkan Kabupaten Semarang (80 desa wisata), Wonosobo (58), dan Purworejo (54) yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengoptimalkan potensi lokal. Kabupaten Blora memiliki kekayaan budaya dan sumber daya alam yang menjanjikan. Potensi tersebut belum ditopang oleh infrastruktur yang memadai, strategi promosi yang efektif, dan sinergi antar pelaku pariwisata. Rendahnya angka desa wisata mencerminkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih progresif untuk memperkuat kontribusi sektor ini terhadap pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Kondisi ini sejalan dengan temuan Imtiyaza et al (2024) yang mengungkapkan bahwa lemahnya dialog tatap muka, kurangnya kepercayaan, dan

minimnya komitmen aktor lokal menyebabkan stagnasi perkembangan desa wisata di banyak daerah.

Pemerintah Kabupaten Blora telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2023–2025. Regulasi tersebut menjadi landasan utama untuk memperkuat tata kelola pariwisata, memberdayakan masyarakat, dan mengembangkan ekonomi desa secara berkelanjutan. Realitas implementasi kebijakan ini ternyata belum menunjukkan hasil yang merata di seluruh desa wisata. Sebagian desa mengalami hambatan teknis, minim koordinasi, dan memiliki kapasitas kelembagaan yang rendah. Temuan lapangan di berbagai daerah memperlihatkan bahwa kualitas desain kelembagaan serta kepemimpinan fasilitatif merupakan faktor penentu efektivitas kolaborasi dalam pengembangan desa wisata (Imtiyaza et al., 2024). Kondisi ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup mendorong kemajuan destinasi wisata tanpa dukungan tata kelola dan kerja sama yang solid.

Pemetaan desa wisata Kabupaten Blora tahun 2024 mencatat keberadaan 18 desa wisata dengan tingkat perkembangan yang bervariasi. Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas desa wisata masih berada pada tahap awal dan memerlukan penguatan serius dalam aspek kelembagaan serta kolaborasi. Rincian data perkembangan desa wisata dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2 Data Desa Wisata Kabupaten Blora Tahun 2024

NO.	Nama Desa	Kecamatan	Basis Pengembangan	Kriteria
1.	Desa Bangsri	Jepón	Ekonomi Kreatif dan Buatan	Maju
2.	Desa Bangowan	Jiken	Alam	Berkembang juara II ADWI 2024
3.	Desa Tempuran	Blora	Alam	Berkembang
4.	Desa	Jepón	Ekonomi Kreatif	Berkembang

NO.	Nama Desa	Kecamatan	Basis Pengembangan	Kriteria
	Tempellemahbang		dan Buatan	
5.	Desa Sambongrejo	Sambong	Budaya	Berkembang
6.	Desa Mendenrejo	Kradenan	Alam dan Budaya	Berkembang
7.	Desa Balong	Jepon	Ekonomi Kreatif	Rintisan
8.	Desa Tunjungan	Tunjungan	Alam	Rintisan
9.	Desa Ledok	Sambong	Alam	Rintisan
10.	Desa Palon	Jepon	Peternakan	Rintisan
11.	Desa Singonegoro	Jiken	Alam	Rintisan
12.	Desa Waru	Jepon	Alam	Rintisan
13.	Desa Janjang	Jiken	Budaya dan Alam	Rintisan
14.	Desa Pengkoljagong	Jati	Alam dan Buatan	Rintisan
15.	Desa Klopoduwur	Banjarejo	Budaya dan Alam	Rintisan
16.	Desa Nglobo	Jiken	Alam dan Buatan	Rintisan
17.	Desa Tinapan	Todanan	Alam	Rintisan
18.	Desa Karangjong	Ngawen	Alam	Rintisan

Sumber : DINPORABUDPAR BLORA 2025

Kecamatan Jepon memperlihatkan dinamika pembangunan desa wisata yang sangat kontras di tengah peta sebaran tersebut. Data menunjukkan bahwa Kecamatan Jepon ini memiliki empat desa wisata dengan pencapaian yang sangat berbeda satu sama lain. Desa Bangsri sukses mencapai kategori “Maju” dan Tempellemahbang berada pada posisi “Berkembang”, sedangkan Desa Balong dan Desa Palon tertinggal di kategori “Rintisan”. Pola perkembangan ini membuktikan bahwa kesamaan wilayah administrasi dan dukungan kebijakan tidak otomatis menjamin keberhasilan yang setara antar desa. Daya tarik Desa Wisata Balong mengalami stagnasi yang signifikan akibat kelemahan dalam pengelolaan, inovasi produk yang belum terarah, serta strategi promosi yang belum adaptif.

Problematisasi dimulai dari perspektif ideal tentang tata kelola desa wisata. Secara normatif, keberhasilan pengembangan desa wisata seharusnya didukung oleh penerapan *collaborative governance* yang efektif (Onibala et al., 2024). Teori menjelaskan bahwa kolaborasi melibatkan sinergi yang kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan publik (Onibala et al., 2024). Dalam

kerangka ideal ini, transparansi dan akuntabilitas memegang peranan vital. Keduanya terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan kompetitif dan keberlanjutan desa wisata (Purnamawati & Hatane, 2024). Proses kolaborasi yang berhasil mensyaratkan adanya tahapan krusial (Alamsyah et al., 2019). Tahapan itu dimulai dari dialog tatap muka (*face to face dialogue*) yang intensif untuk memecahkan stereotip. Dialog ini kemudian menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses (*commitment to process*), serta pemahaman bersama (*shared understanding*) di antara seluruh pemangku kepentingan (Alamsyah et al., 2019).

Realitas empiris sering kali memperlihatkan kegagalan dalam mencapai kondisi ideal tersebut. Kegagalan ini disebabkan adanya berbagai faktor penghambat (*inhibiting factors*) dalam proses kolaborasi (Imtiyaza et al., 2024). Hambatan umumnya mencakup aspek keanggotaan, struktur, komunikasi, dan sumber daya yang tidak memadai (Imtiyaza et al., 2024). Proses kolaboratif menjadi tidak optimal akibat belum adanya sinergi antar *stakeholder*. Para *stakeholder* masih terjebak pada ego sektoral dan kepentingan masing-masing (Aristy et al., 2021). Kurangnya intensitas pertemuan dan komunikasi yang buruk menyebabkan rendahnya kepercayaan dan lemahnya komitmen para aktor (Aristy et al., 2021; Imtiyaza et al., 2024). Akibatnya, pemahaman bersama mengenai prioritas pengembangan gagal tercapai. Ketidakhadiran elemen-elemen kunci ini mengakibatkan kolaborasi hanya bersifat formalitas. Kolaborasi tersebut tidak menghasilkan dampak nyata atau *outcome* yang konkret bagi masyarakat (Aristy et al., 2021).

Fenomena ketertinggalan Desa Balong ini mencerminkan adanya

kesenjangan pembangunan (development gap) yang signifikan. Kesenjangan tersebut terutama terlihat dalam aspek tata kelola, inovasi, dan efektivitas kolaborasi antar-aktor. Potensi besar desa gagal diterjemahkan menjadi kemajuan terukur akibat struktur kelembagaan yang lemah. Kondisi ini menempatkan Desa Balong sebagai studi kasus krusial dalam memahami kegagalan konversi aset lokal menjadi daya saing pariwisata daerah.



Gambar 1. 2 Brosur Paket Desa Wisata Balong

Sumber : Desa Wisata Balong

Promosi Desa Wisata Balong yang masih bergantung pada media konvensional, seperti brosur mengacu pada Gambar 1.2, secara nyata membatasi jangkauan destinasi dan melemahkan daya saing di tengah kompetisi pariwisata berbasis digital. Keterbatasan ini serupa dengan temuan di Desa Kaliwlingi, di mana lemahnya inovasi promosi digital menyebabkan informasi destinasi tidak tersampaikan secara efektif (Eldo & Prabowo, 2020). Akibatnya, sebagian besar desa wisata dengan potensi tinggi, seperti Balong, masih minim strategi pemasaran modern. Akar masalah ini sering kali terletak pada kendala kolaborasi (*Collaborative Governance*), di mana kelemahan komunikasi dan terbatasnya

kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) antar-aktor pengelola menghambat munculnya inovasi (Imtiyaza et al., 2024). Jika masalah SDM dan kurangnya sinergi ini tidak diatasi, proses kolaborasi menjadi tidak optimal, dan strategi pemasaran modern tidak akan tercapai (Aristy et al., 2021).

Padahal, adopsi digitalisasi terbukti krusial dan harus menjadi arah promosi Desa Balong selanjutnya. Pemanfaatan media digital, seperti media sosial dan *website*, telah terbukti menjadi faktor penunjang keberhasilan yang signifikan dalam meningkatkan jumlah kunjungan dan efektivitas pemasaran destinasi (Maulia & Setiyono, 2023). Contohnya terlihat pada Desa Wisata Nglanggeran, yang mengadopsi digitalisasi promosi dan berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan secara signifikan (Jamalina & Wardani, 2017). Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* yang efektif, didukung oleh kesepahaman bersama (*shared understanding*) antar-aktor, mampu memperkuat keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dan mendorong pembangunan desa wisata yang berkelanjutan (Alamsyah et al., 2019; Purnamawati & Hatane, 2024).

Keterbatasan dalam strategi promosi tersebut tidak hanya membuat Desa Wisata Balong kurang dikenal luas, tetapi juga berdampak langsung pada menurunnya minat kunjungan wisatawan. Informasi yang tidak tersampaikan secara efektif membuat potensi desa tidak terekspos secara maksimal, sehingga wisatawan cenderung memilih destinasi lain yang lebih mudah diakses secara digital dan memiliki daya tarik promosi yang lebih kuat.



Gambar 1. 3 Grafik Data Kunjungan Desa Wisata Balong Griya Keramik

Sumber : Pengelola Desa Wisata Balong Griya Keramik

Penurunan jumlah kunjungan wisatawan menjadi permasalahan utama Desa Wisata Balong. Data pengelola pada Gambar 1.3 menunjukkan penurunan tajam jumlah wisatawan dari 751 orang (2019) menjadi 132 orang (2021). Penurunan signifikan ini tidak terlepas dari keterbatasan infrastruktur dasar. Akses jalan, fasilitas sanitasi, dan ketiadaan *homestay* sangat memengaruhi kualitas pengalaman wisatawan. Fenomena serupa terjadi di Desa Kaliwlingi, Brebes, di mana jumlah wisatawan menurun drastis akibat kerusakan fasilitas dan minimnya perbaikan infrastruktur (Astuti et al., 2020). Keterbatasan infrastruktur mencerminkan kegagalan proses *Collaborative Governance*. Kurangnya sinergi antar-aktor menghambat perbaikan sarana dasar (Aristy et al., 2021). Komitmen yang kurang dari pemangku kepentingan menjadi faktor utama lambatnya pengembangan fasilitas di desa wisata (Utami et al., 2021).

Perbaikan dan penyediaan infrastruktur dasar sangat penting untuk pemulihan minat kunjungan dan peningkatan kualitas layanan wisatawan. Strategi pembangunan infrastruktur bertahap melalui capaian kecil (*small wins*) mampu memperbaiki mutu layanan serta memulihkan minat kunjungan (Akbar et al., 2022).

Infrastruktur yang memadai akan memperkuat dimensi keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) desa wisata yang berkelanjutan (Purnamawati & Hatane, 2024). Desa wisata lain telah menunjukkan keberhasilan dalam penyediaan fasilitas. Desa Budo, misalnya, berhasil menyiapkan fasilitas *homestay* dan mengintegrasikan potensi edukasi yang optimal berkat kolaborasi (Onibala et al., 2024). Kolaborasi yang efektif memastikan ketersediaan sarana dasar yang memadai, elemen esensial bagi peningkatan kualitas pengalaman dan daya tarik Desa Balong.

Alokasi anggaran Desa Balong untuk sektor pariwisata tercatat sangat rendah, yakni 0,13% dari APBDes pada 2024 dan meningkat menjadi 0,52% pada 2025. Proporsi tersebut menunjukkan bahwa pariwisata belum dipandang sebagai sektor strategis dalam pembangunan desa. Kondisi ini konsisten dengan hasil penelitian Eldo & Prabowo (2020) yang menyebutkan bahwa keterbatasan dana desa menjadi faktor penghambat utama dalam penguatan kelembagaan dan pengembangan produk wisata. Pemerintah desa semestinya berperan sebagai katalis dalam penyediaan modal awal (Onibala et al., 2024). Studi Tilano & Suwitri (2019) menunjukkan bahwa perluasan jaringan kemitraan pendanaan dengan sektor swasta, BUMN, dan akademisi dapat mengurangi ketergantungan pada dana desa sekaligus mempercepat pengembangan wisata.

Permasalahan infrastruktur pariwisata di Balong berkaitan erat dengan minimnya dukungan anggaran dari pemerintah desa. Pada 2023, APBDes tidak mengalokasikan dana khusus untuk sektor ini. Pada 2024 dialokasikan Rp2.000.000 (0,13% dari APBDes Rp1,53 miliar). Jumlah ini meningkat menjadi Rp8.000.000 pada 2025 (0,52% dari APBDes Rp1,54 miliar). Besaran anggaran yang meningkat

belum mencerminkan pariwisata sebagai prioritas strategis desa. Keterbatasan dana menyebabkan terhambatnya pembangunan infrastruktur, promosi, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 1. 3 Alokasi Anggaran Pariwisata dan Total APBDes Desa Balong Tahun 2023-2025

Tahun	Total APBDes (Rp)	Anggaran Pariwisata (Rp)	Presentasi dari Total APBDes (%)
2023	1.534.533.600	0	0.00%
2024	1.534.533.600	2.000.000	0,13%
2025	1.542.397.600	8.000.000	0,52%

Sumber : Dokumen APBDes Desa Balong 2023-2025 (diolah)

Ketimpangan pendanaan yang disorot dalam data semakin diperparah oleh keterbatasan infrastruktur pendukung yang ada di Desa Wisata Balong, berimplikasi langsung pada penurunan minat dan jumlah kunjungan wisatawan. Minimnya investasi dari pemerintah desa menyebabkan pengembangan sarana dan prasarana dasar berjalan lambat, seperti akses jalan yang buruk, ketersediaan fasilitas sanitasi, dan manajemen area parkir yang tidak memadai. Kondisi ini menciptakan hambatan serius yang mengurangi daya tarik dan kenyamanan pengunjung. Kegagalan dalam mengatasi masalah ini serupa dengan temuan pada studi kasus Desa Wisata Kemetul, di mana perkembangannya lambat dan keberadaannya tidak banyak diketahui masyarakat akibat kurangnya komitmen dari stakeholders, sehingga pengembangannya kurang berjalan maksimal (Utami et al., 2021). Lebih lanjut, kendala ini diperkuat oleh riset di desa wisata lain yang menemukan bahwa upaya pengembangan pariwisata seringkali tidak memberikan jaminan keberlanjutan akibat keterbatasan sumber daya pada setiap aktor yang terlibat dalam tata kelola (Matthoriq et al., 2021). Dengan demikian, kurangnya alokasi anggaran dan komitmen pada perbaikan infrastruktur menjadi faktor penekan yang mengancam keberlanjutan dan profitabilitas Desa Wisata Balong

Kondisi stagnan di Desa Wisata Balong yang diakibatkan oleh kurangnya investasi infrastruktur dan tata kelola yang lemah, seharusnya dapat mencontoh keberhasilan desa-desa wisata lain yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Berbanding terbalik dengan Desa Balong, model pengembangan desa wisata ideal yang berkelanjutan telah dicapai melalui penerapan strategi *Collaborative Governance*. Contohnya, studi kasus pada Desa Wisata Nglanggeran menunjukkan bahwa strategi kolaborasi ini tepat dan efektif karena melibatkan keterlibatan multi aktor yang saling berkontribusi sesuai dengan kapabilitasnya masing-masing (Maulia & Setiyono, 2023). Selain itu, faktor keberhasilan desa wisata yang kompetitif dan berkelanjutan juga didorong oleh aspek tata kelola yang baik. Penelitian di Bali, misalnya, membuktikan bahwa variabel transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap desa ekowisata yang berkelanjutan (*sustainable ecotourism villages*) (Purnamawati & Hatane, 2024). Oleh karena itu, langkah fundamental yang harus segera diambil adalah merealisasikan rekomendasi yang sudah disarankan, yaitu menerapkan strategi promosi baru dan perluasan kemitraan pendanaan agar desa wisata tidak lagi bergantung pada anggaran pemerintah semata (Imtiyaza et al., 2024).

Situasi ini menunjukkan kurangnya kontribusi nyata dari para pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan desa wisata. Dalam kerangka *collaborative governance*, pembangunan infrastruktur merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Ketidakterlibatan aktor-aktor tersebut mencerminkan adanya hambatan dalam membentuk tata kelola kolaboratif yang efektif. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses

perencanaan dan pengambilan keputusan menjadi persoalan utama. Persepsi bahwa pengelolaan wisata merupakan tanggung jawab eksklusif pemerintah desa semakin memperlemah semangat kolektif. Minimnya keterlibatan warga menyebabkan potensi wisata desa tidak dikelola secara maksimal dan berkelanjutan.

Desa wisata Balong di Kecamatan Jepon

Masih belum bisa dijadikan mata pencaharian



Pengembangan desa wisata di Desa Balong, Kecamatan Jepon masih belum bisa digenjut. Pasalnya, bagi pelaku wisata di desa tersebut, pekerjaan yang justru menjanjikan berasal dari sektor produksi genteng dan batu bata. Bagaimana tantangan menghadapi kelompok sadar wisata (pokdarwis) di desa tersebut, berikut wawancara dengan Susanto dari Pokdarwis Desa Balong.

Gambar 1. 4 Berita Minimnya Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Balong

Sumber : (Wartablora, 2022)

Berdasarkan laporan yang dipublikasikan oleh Wartablora (2022), mencatat bahwa jumlah anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang aktif di Desa Wisata Balong mengalami penurunan drastis, dari puluhan orang menjadi hanya delapan orang yang masih terlibat secara aktif. Penurunan tersebut mencerminkan melemahnya semangat kolektif masyarakat dalam mendukung pengelolaan pariwisata, sekaligus menunjukkan adanya pergeseran orientasi ekonomi warga. Penelitian Mutiarawati & Sudarmo (2021) di Desa Kemetul menunjukkan fenomena serupa, di mana banyak warga enggan terlibat karena lebih memilih sektor ekonomi lain yang dianggap lebih menjanjikan secara finansial. Minimnya keterlibatan warga mengakibatkan lemahnya basis sosial penggerak wisata. Penelitian Onibala et al (2024) membuktikan bahwa pemberdayaan

masyarakat melalui pelatihan dan peran strategis mampu memulihkan partisipasi kolektif serta memperkuat keberlanjutan desa wisata.

Fenomena tersebut mengindikasikan tergerusnya semangat kolaboratif di tingkat lokal yang selama ini menjadi fondasi utama dalam pembangunan sektor pariwisata berbasis komunitas. Kegagalan membangun pola pengelolaan yang inklusif telah mempersempit peluang Desa Balong untuk berkembang sebagai destinasi wisata edukasi berbasis budaya lokal. Penurunan daya saing yang terus berlanjut memperbesar ketertinggalan Desa Balong dibandingkan dengan desa wisata lain yang telah berhasil membangun tata kelola secara lebih terstruktur. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pengelolaan destinasi tidak hanya memerlukan potensi alam dan budaya, melainkan juga keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.

Penerapan konsep *collaborative governance* menjadi relevan dalam menjawab berbagai hambatan yang dihadapi Desa Wisata Balong, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya strategi promosi, serta kurangnya inovasi dalam pengelolaan destinasi. Model tata kelola ini menekankan pentingnya kolaborasi antaraktor pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan sektor swasta dalam merancang dan mengelola destinasi wisata secara partisipatif. Keterlibatan multipihak memungkinkan integrasi sumber daya, pengetahuan, dan kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan tata kelola pariwisata yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi yang sinergis, potensi lokal dapat dioptimalkan dan posisi Desa Wisata Balong dapat diperkuat dalam peta pengembangan pariwisata di tingkat daerah maupun nasional.

Konsep *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell & Gash

(2008) menitikberatkan pada proses kolaboratif yang bersifat iteratif, dinamis, dan saling memperkuat. Proses ini bertumpu pada lima elemen kunci, yaitu dialog tatap muka untuk membangun komunikasi yang setara, pembentukan kepercayaan (*trust building*) antaraktor, komitmen terhadap proses agar partisipasi tidak sekadar bersifat formalitas, pemahaman bersama (*shared understanding*) terhadap tujuan kolektif, serta pencapaian hasil-hasil kecil (*intermediate outcomes* atau *small wins*) yang berfungsi memperkuat keberlanjutan kolaborasi. Kelima elemen tersebut saling berinteraksi dalam membentuk siklus kolaborasi yang produktif dan menjadi dasar bagi efektivitas tata kelola kolaboratif. Dalam konteks pengembangan Desa Wisata Balong, kelima aspek ini penting untuk diterapkan agar mampu memperkuat hubungan antaraktor, membangun rasa saling percaya, dan menghasilkan kemajuan yang terukur dalam proses pengelolaan destinasi.

Penerapan *collaborative governance* dalam konteks pengelolaan desa wisata, khususnya Desa Wisata Balong, masih relatif belum teruji secara optimal. Desa ini belum pernah mencapai fase kejayaan dan kini mengalami gejala stagnasi, berbeda dengan berbagai studi terdahulu yang mengkaji desa wisata yang sempat mengalami kemajuan sebelum akhirnya menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola yang diterapkan sebelumnya belum sepenuhnya efektif dalam mengakselerasi perkembangan desa wisata. Strategi baru yang lebih inovatif dan berbasis kolaborasi terstruktur diperlukan untuk menjawab tantangan tersebut, sehingga proses kolaborasi dapat berfungsi sebagai instrumen utama dalam mengintegrasikan peran antaraktor secara lebih seimbang dan produktif.

Penelitian ini memiliki signifikansi teoretis dan praktis dalam memahami dinamika kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan desa

wisata. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat penerapan konsep *collaborative governance* Ansell & Gash (2008) pada konteks pariwisata berbasis komunitas. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi dasar perumusan strategi tata kelola yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta secara aktif. Tata kelola yang terintegrasi dan partisipatif diharapkan mampu mengoptimalkan potensi Desa Wisata Balong, memperluas manfaat ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama: Mengapa penerapan proses kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Balong masih menghadapi berbagai hambatan proses kolaborasi yang diduga bersumber dari rendahnya kerja sama pengelolaan antaraktor, sehingga perkembangan desa wisata menjadi terhambat? (Ansell & Gash, 2008)

1.2 Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses kolaborasi
2. Kurangnya inovasi dan strategi promosi wisata.
3. Minimnya kerja sama antarpemangku kepentingan.
4. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan akibat keterbatasan infrastruktur pendukung.
5. Kurangnya dukungan pemerintahan desa dalam pendanaan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, terdapat beberapa

permasalahan yang mendasari penelitian ini terkait penerapan proses kolaborasi dalam pengembangan desa wisata, khususnya di Desa Balong, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Balong Kecamatan Jepon Kabupaten Blora?
2. Apa saja faktor mempengaruhi dalam proses kolaborasi di Desa Wisata Balong Kecamatan Jepon Kabupaten Blora?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis proses kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Balong Kecamatan Jepon Kabupaten Blora.
2. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi dalam proses kolaborasi di Desa Wisata Balong Kecamatan Jepon Kabupaten Blora.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah kajian tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) pada sektor pariwisata berbasis komunitas. Di samping itu, penelitian ini turut memperkaya khazanah literatur mengenai implementasi kolaborasi dalam pengembangan desa wisata, khususnya di Kabupaten Blora yang hingga kini masih relatif terbatas. Temuan dan

analisis yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi studi-studi lanjutan yang berfokus pada dinamika kerja sama antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan desa wisata, baik pada level lokal, regional, maupun nasional.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penerapan proses kolaborasi melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas, dan penyediaan infrastruktur pendukung. Selain itu, penelitian ini juga menyusun rekomendasi strategis bagi masyarakat lokal agar lebih aktif dan mampu mengelola desa wisata secara mandiri. Bagi sektor swasta, hasil penelitian ini membantu dalam memahami potensi kontribusi mereka melalui investasi, promosi, dan pelatihan. Temuan ini diharapkan dapat menginspirasi pengelola desa wisata lain untuk menerapkan tata kelola kolaboratif yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus mendorong terbentuknya model kolaborasi yang efektif dan dapat direplikasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan berbagai referensi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan fokus penelitian ini yang membahas mengenai manajemen talenta pada sektor publik. Kajian terdahulu yang berhubungan dengan fokus penelitian ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Penelitian Terdahulu

NO.	JUDUL	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL
1.	<i>Collaborative Governance In Strengthening Dimensions of Competitive Advantage of Sustainable Ecotourism Villages</i> (Purnamawati & Hatane, 2024)	Penelitian ini menganalisis penerapan <i>Collaborative Governance</i> dalam pengembangan Desa Wisata Budo, Minahasa Utara, dengan fokus pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta serta kontribusi masing-masing dalam pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan.	Penelitian ini mengadopsi konsep <i>Collaborative Governance</i> , teori Pariwisata Berkelanjutan, dan Pendekatan Pembangunan Berbasis Masyarakat, fokus pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara, dan observasi. Sebanyak 15 informan dipilih secara purposive. Analisis data mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldana: pengumpulan, kondensasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.	Hasil Penelitian (Ringkasan Singkat): Pengelolaan Desa Wisata Budo masih didominasi masyarakat lokal, dengan peran pemerintah dan swasta yang minim. Atraksi dan fasilitas wisata sudah ada namun perlu pengembangan, dan aksesibilitas cukup baik. Kolaborasi terjadi melalui kerja sama dengan BUMN, perguruan tinggi, dan dukungan UMKM. Kendala Utama: Kurangnya komunikasi, rendahnya kepercayaan, komitmen stakeholder yang lemah, dan ketergantungan pada masyarakat lokal.
2.	<i>Collaborative Governance</i> dalam	Penelitian ini menganalisis peran <i>Collaborative</i>	Penelitian ini mengacu pada tiga konsep utama: (1) <i>Collaborative</i>	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas

NO.	JUDUL	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL
	pengembangan desa wisata Budo Kabupaten Minahasa Utara (Onibala et al., 2024)	<i>Governance</i> dalam memperkuat daya saing desa ekowisata berkelanjutan di Buleleng, Bali, dengan menilai pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab, serta peran moderasi tiga dimensi desa: Desa Wisata, Desa Digital, dan Desa Virus.	<i>Governance</i>, yakni tata kelola kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pengembangan desa ekowisata; (2) Desa Ekowisata Berkelanjutan, yaitu pariwisata yang menjaga keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi; serta (3) Tiga Dimensi Desa Wisata: DEWI (pengembangan wisata berbasis alam dan budaya), DEDI (pemanfaatan teknologi digital), dan DEVI (penyebaran semangat ekowisata ke desa lain).	<i>explanatory</i> dengan 250 responden dan analisis SEM melalui WarpPLS 5.0. Variabel terdiri dari: (1) bebas transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab; (2) terikat keunggulan kompetitif desa ekowisata; (3) moderator dimensi DEWI, DEDI, dan DEVI.	berpengaruh positif signifikan terhadap keberlanjutan desa ekowisata, sedangkan tanggung jawab berpengaruh negatif. Dimensi DEWI, DEDI, dan DEVI memoderasi hubungan transparansi dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan, namun tidak memoderasi akuntabilitas.
3.	<i>Collaborative Governance</i> dalam Mengembangkan Wisata Edukasi Di Desa Kamiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara (Alamsyah et al., 2019)	Penelitian ini bertujuan menganalisis <i>Collaborative Governance</i> dalam pengembangan wisata edukasi di Desa Kamiri, Luwu Utara, dengan fokus pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pengelola wisata melalui empat tahap: <i>face to face</i>, <i>trust building</i>, <i>commitment to process</i>, dan <i>shared understanding</i>.	Penelitian ini mengacu pada teori <i>Collaborative Governance</i> dari Ansell dan Gash, yang mencakup empat tahap kolaboratif: (1) <i>Face to Face</i> Interaksi langsung antar pemangku kepentingan; (2) <i>Trust Building</i> membangun kepercayaan melalui pelatihan dan fasilitas; (3) <i>Commitment to Process</i> komitmen menjaga keberlanjutan dengan partisipasi aktif; dan (4) <i>Shared Understanding</i> kesepahaman bersama melalui forum dan promosi.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui: (1) wawancara dengan pihak terkait seperti pejabat dinas, pengelola, dan masyarakat; (2) observasi langsung terhadap pengelolaan dan kolaborasi wisata edukasi; serta (3) dokumentasi berupa foto, arsip, dan data pendukung lainnya.	Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pengelola wisata di Desa Kamiri sudah berjalan baik, meski ada beberapa kendala. Peningkatan diperlukan dalam pengelolaan sumber daya, infrastruktur, dan promosi wisata agar lebih optimal.

NO.	JUDUL	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL
4.	Proses Kolaboratif dalam pengembangan Geopark Pongkor Sebagai Kawasan Pariwisata Di Kabupaten Bogor (Aristy et al., 2021)	Penelitian ini menganalisis proses Collaborative Governance dan hambatan dalam pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi, serta menilai efektivitas kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta.	Penelitian ini menggunakan teori Collaborative Governance dari Ansell & Gash, yang menekankan empat aspek utama dalam proses kolaborasi: dialog tatap muka, membangun kepercayaan melalui transparansi, komitmen terhadap proses oleh semua pihak, dan pemahaman bersama mengenai visi dan tujuan untuk keberlanjutan desa wisata.	Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan teori collaborative governance, pengambilan informan purposive dan snowball, serta analisis data melalui reduksi dan triangulasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Collaborative Governance</i> di Desa Wisata Kaliwlingi belum optimal, dengan kendala pada keanggotaan, struktur, komunikasi, serta keterbatasan sumber daya. Hal ini menghambat pengelolaan dan promosi wisata, menyebabkan penurunan kunjungan. Perbaikan komunikasi, kesepahaman prioritas, dan strategi baru diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi.
5.	<i>Collaborative Governace</i> dalam Pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi di Kabupaten Brebes (Imtiyaza et al., 2024)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kolaboratif dalam pengembangan Geopark Pongkor sebagai kawasan pariwisata di Kabupaten Bogor. Studi ini mengevaluasi efektivitas kerja sama antara pemerintah, sektor bisnis, akademisi, dan masyarakat dalam mengelola Geopark Pongkor agar menjadi destinasi wisata yang berkelanjutan dan berdaya saing serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal.	Penelitian ini menggunakan teori <i>Collaborative Governance</i> dari Ansell & Gash (2008) yang mencakup lima aspek: dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil konkret yang diukur dari dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan.	Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, menganalisis proses kolaboratif dalam pengembangan Geopark Pongkor menggunakan model <i>collaborative governance</i> dari Ansell & Gash (2008). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan triangulasi sumber. Analisis data mengikuti model (Creswell, 2016), meliputi persiapan data, pembacaan, pemberian kode, deskripsi kode, penyajian data, dan interpretasi.	Hasil penelitian menunjukkan kolaborasi dalam pengembangan Geopark Pongkor belum optimal karena kurangnya sinergi antar stakeholder, komunikasi, kepercayaan, dan komitmen yang rendah. Hal ini menghambat manfaat yang dirasakan masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan komunikasi intensif, partisipasi masyarakat, dan penyelarasan kepentingan antar stakeholder.

NO.	JUDUL	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL
6.	<i>Collaborative Management Model Tanjung Lesung Tourism In Pandeglang District, Banten Province, Indonesia</i> (Kismartini & Pujiyono, 2020)	Penelitian ini menganalisis model pengelolaan kolaboratif dalam pengembangan pariwisata Tanjung Lesung, dengan fokus pada peran kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, potensi sosial, dan pelestarian lingkungan.	Penelitian ini menggunakan teori <i>Collaborative Governance</i> dari Ansell & Gash (2008), yang menekankan kerja sama antar stakeholder dalam pariwisata. Aspek utamanya meliputi dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, dan hasil konkret yang berdampak pada kesejahteraan dan keberlanjutan pariwisata.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melibatkan 40 pemangku kepentingan melalui wawancara, observasi, dan FGD. Fokusnya adalah pemetaan pemangku kepentingan berdasarkan kepentingan, pengaruh, dan kekuasaan, serta analisis proses kolaboratif dalam tiga tahap: inisiasi, pengembangan, dan operasionalisasi.	Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan pariwisata Tanjung Lesung belum terkoordinasi dengan baik, dengan dominasi pemerintah dan sektor swasta, serta peran masyarakat yang terbatas. Hambatan utama adalah perbedaan kapasitas organisasi dan komunikasi yang lemah. Diajukan model untuk meningkatkan kolaborasi melalui koordinasi dan integrasi pemangku kepentingan.
7.	<i>Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran: Analisis Dampak Digitalisasi Desa Wisata</i> (Maulia & Setiyono, 2023)	Penelitian ini menganalisis <i>Collaborative Governance</i> dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran dan dampak digitalisasi. Menggunakan model Ansell dan Gash, penelitian fokus pada lima indikator utama dan mengeksplorasi peran media sosial serta platform online dalam meningkatkan promosi dan pelayanan wisata.	Penelitian ini menggunakan teori <i>Collaborative Governance</i> dari Ansell & Gash (2008), yang menekankan kerja sama antar pemangku kepentingan. Model ini mencakup lima proses: dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen, berbagi pemahaman, dan hasil nyata seperti peningkatan wisatawan dan kesejahteraan masyarakat.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi makna di balik proses kolaboratif dan dampak digitalisasi di Desa Wisata Nglanggeran, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima proses kolaborasi dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen, berbagi pemahaman, dan hasil sementara telah dilaksanakan dengan baik, memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. Namun, hambatan seperti kesulitan menyelaraskan visi dan terbatasnya kapasitas SDM masih ada. Digitalisasi terbukti berdampak positif dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan perekonomian lokal, dan mempromosikan destinasi wisata melalui platform digital.

NO.	JUDUL	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL
8.	<i>Collaborative Governance</i> dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang (Utami et al., 2021)	Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan <i>Collaborative Governance</i> dalam pengembangan Desa Wisata Kemetul di Kabupaten Semarang. Studi ini mengevaluasi kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta, serta mengidentifikasi faktor keberhasilan dan kendala dalam proses kolaboratif tersebut.	Penelitian ini mengacu pada teori <i>Collaborative Governance</i> dari Ansell & Gash (2008), yang mencakup empat variabel utama: starting condition, kepemimpinan fasilitatif, desain institusional, dan proses kolaborasi. Selain itu, konsep faktor keberhasilan dari DeSeve (2007) juga digunakan, yang meliputi struktur jaringan, komitmen, kepercayaan, akses sumber daya, dan kejelasan tata kelola.	Penelitian deskriptif kualitatif ini dilakukan di Desa Wisata Kemetul dengan teknik purposive sampling, menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis berdasarkan model <i>Collaborative Governance</i> Ansell dan Gash.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan <i>Collaborative Governance</i> di Desa Wisata Kemetul belum optimal akibat rendahnya komitmen, partisipasi, pemahaman visi bersama, serta kendala regulasi dan jaringan informasi. Namun, kepercayaan yang kuat dan pembagian tanggung jawab yang jelas menjadi faktor pendukung keberhasilan.
9.	<i>Collaborative Governance</i> dalam Pengembangan Desa Wisata Gubugklakah Kabupaten Malang (Akbar et al., 2022)	Penelitian ini menganalisis penerapan <i>Collaborative Governance</i> dalam pengembangan Desa Wisata Gubugklakah, dengan fokus pada peningkatan daya saing melalui kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan swasta, serta identifikasi faktor pendukung dan penghambat kolaborasi.	Penelitian ini menggunakan teori <i>Collaborative Governance</i> (Ansell & Gash, 2008), yang menekankan kerja sama antara pemerintah dan non-pemerintah melalui empat elemen utama: kondisi awal, desain institusional, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Selain itu, konsep pengembangan desa wisata digunakan untuk menilai peran masyarakat dalam meningkatkan daya tarik dan keberlanjutan desa wisata.	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dan data sekunder. Analisis dilakukan untuk memahami bagaimana proses kolaborasi berkembang, serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambatnya.	Proses kolaborasi di Desa Wisata Gubugklakah berlangsung melalui dialog tatap muka, kondisi awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan fasilitatif. Kolaborasi ini berdampak positif terhadap ekonomi lokal, namun masih menghadapi hambatan seperti kurangnya koordinasi antar aktor dan distribusi manfaat yang belum merata.
10.	<i>Collaborative Governance</i> dalam Tata	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran	Penelitian ini menganalisis penerapan <i>Collaborative</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan <i>Collaborative Governance</i>

NO.	JUDUL	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL
	Kelola Pariwisata-Desa (Studi PariwisataDesa “Bumiaji Agrotourism” di Kota Wisata Batu (Matthoriq et al., 2021)	<i>Collaborative Governance</i> dalam tata kelola pariwisata desa di Bumiaji Agrotourism, Kota Batu. Studi ini mengevaluasi efektivitas kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas serta mengidentifikasi hambatan dalam penerapannya.	<i>Governance</i> di Bumiaji Agrotourism untuk mendukung keberlanjutan wisata berbasis komunitas, menggunakan teori Ansell & Gash (2008) dan konsep Good Tourism Governance serta model Pentahelix untuk memperkuat daya saing desa wisata.	deskriptif dengan wawancara mendalam dan observasi partisipatif untuk memahami kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan “Bumiaji Agrowisata” di Kota Wisata Batu.	berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat jaringan pariwisata. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menciptakan sinergi yang lebih baik dalam pengelolaan pariwisata desa, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal sebagai aktor kunci, yang penting untuk pengembangan kebijakan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.
11.	<i>Sustainable Regional Development Through the Development of Smart Village and Smart Branding: A Case Study of Bangsri Village, Blora Regency</i> (Rachmawati et al., 2024)	Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor pengembangan smart village dan smart branding di Desa Bangsri, serta menganalisis strategi pembangunan berkelanjutan, fokus pada kepemimpinan desa, dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan promosi pariwisata. Hasilnya diharapkan merumuskan strategi inovatif untuk pengembangan desa wisata.	Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, kemudian dianalisis menggunakan analisis SWOT untuk merumuskan strategi pembangunan desa wisata yang berkelanjutan.	Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus dengan menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Data diperoleh melalui survei, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan lokal, serta analisis data sekunder terkait pembangunan desa.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep <i>smart village</i> dan <i>smart branding</i> di Desa Bangsri telah berkontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan, seperti peningkatan ekonomi dan partisipasi masyarakat. Temuan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa pendekatan integratif dan kolaboratif dapat mempercepat transformasi desa menjadi desa pintar yang berdaya saing.
12.	<i>Collaborative Governance in Tourism Development in Indonesia: Study of</i>	Penelitian ini menganalisis penerapan <i>Collaborative Governance</i> dalam pengembangan pariwisata di	Penelitian ini menggunakan teori <i>Collaborative Governance</i> dari Ansell & Gash (2008), yang mencakup empat elemen utama:	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi deskriptif, menggunakan purposive	Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam pariwisata Sumatera Selatan masih dalam tahap awal, dengan hambatan

NO.	JUDUL	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL
	<i>South Sumatera Province</i> (Sinaga, 2021)	Sumatera Selatan, dengan fokus pada evaluasi kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta identifikasi faktor penghambat dalam proses kolaboratif.	<i>Starting Condition, Institutional Design, Facilitative Leadership, dan Collaborative Process.</i> Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi Pentahelix Model, yang melibatkan lima elemen utama (pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media) dalam pengembangan pariwisata untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan.	sampling untuk memilih informan pemerintah daerah dan masyarakat. Analisis data meliputi reduksi data dan penarikan kesimpulan, dengan fokus pada teori <i>Collaborative Governance</i> dari Ansell & Gash.	membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan. Pemerintah belum mengalokasikan sumber daya yang cukup, mengurangi keterlibatan pihak lain. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pariwisata dan mencapai pembangunan berkelanjutan.
13.	<i>Collaborative Governance in Tourism Village Development in Ciamis Regency, West Java Province, Indonesia</i> (Nurwanda et al., 2024)	Penelitian ini menganalisis penerapan <i>Collaborative Governance</i> dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Ciamis, dengan fokus pada evaluasi kolaborasi antar pihak dan identifikasi model tata kelola kolaboratif yang ideal.	Penelitian ini menggunakan teori <i>Collaborative Governance</i> dari Ansell & Gash (2008), yang mencakup faktor awal kolaborasi, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses interaksi antar pemangku kepentingan. Selain itu, konsep <i>Good Governance</i> dalam pariwisata dengan model Pentahelix melibatkan pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat, dan media digunakan untuk mendorong keberlanjutan desa wisata.	Penelitian tentang tata kelola kolaboratif Untuk pengembangan desa wisata di Kabupaten Ciamis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan peran pemerintah yang dominan dalam pengembangan desa wisata secara kolaboratif di Kabupaten Ciamis. Di sisi lain, keterlibatan pihak nonpemerintah dalam pengembangan desa wisata secara kolaboratif masih kurang optimal. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya komunitas pengabdian masyarakat bidang pariwisata yaitu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang terbentuk
14.	<i>Collaborative Governance Towards Development of Eco-Based</i>	Penelitian ini menganalisis penerapan <i>Collaborative Governance</i> dalam pengembangan desa wisata ekowisata di Desa Kalipucang,	Penelitian ini menggunakan teori <i>Collaborative Governance</i> dari Emerson & Nabatchi (2015), yang mencakup proses interaksi antar stakeholder, hasil	Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dimana. Peneliti melakukan. Pengumpulan data dengan beberapa	Kolaborasi dalam pengembangan ekowisata di Desa Wisata Kalipucang telah mengikuti kerangka <i>Collaborative Governance</i> , namun masih menghadapi kendala seperti

NO.	JUDUL	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL
	<i>Tourism Village in Kalipucang Village, Pasuruan Regency</i> (Pambudi et al (2020))	dengan fokus pada evaluasi proses, hasil, serta faktor pendukung dan penghambat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.	kolaborasi seperti peningkatan ekonomi dan keberlanjutan, serta faktor pendukung dan hambatan seperti regulasi, kepemimpinan, dan sumber daya. Selain itu, konsep ekowisata digunakan untuk menekankan aspek keberlanjutan dan pemberdayaan ekonomi lokal.	informan melalui penentuan sampel secara purposive sampling.	minimnya dukungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, lemahnya komitmen antar kelompok kerja, serta gesekan sosial di antara mereka.
15.	<i>Analysis of Collaborative Governance in Tourism Based on Coastal Community Empowerment</i> (Mahadiansar et al., 2023)	Penelitian ini menganalisis penerapan <i>Collaborative Governance</i> dalam pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat pesisir, dengan fokus pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.	Penelitian ini mengaplikasikan teori <i>Collaborative Governance</i> dari Ansell & Gash (2008) yang mencakup dialog, kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, dan hasil awal. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Pesisir digunakan untuk memastikan partisipasi aktif dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi wisata.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di wilayah pesisir, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen terkait pengembangan pariwisata berbasis komunitas.	Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar pihak dalam pengembangan pariwisata pesisir meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi lokal, meski masih ada hambatan berupa keterbatasan kapasitas dan sumber daya masyarakat. Peningkatan kapasitas dinilai penting untuk keberlanjutan.

Sumber : Diolah dan dianalisis dari berbagai Artikel Jurnal oleh Peneliti, Tahun 2025

Studi terdahulu mengenai tata kelola kolaboratif dalam pengembangan pariwisata menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sangat dipengaruhi oleh kerjasama harmonis antara pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta. Kolaborasi ini tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Penelitian Collaborative Management Model Tanjung Lesung Tourism in Pandeglang District, Banten Province*, membuktikan peran penting kolaborasi antara pemerintah daerah, pengelola wisata, dan masyarakat lokal dalam perencanaan serta pengelolaan destinasi. Prinsip tata kelola kolaboratif relevan diterapkan di Desa Wisata Balong dengan peran pemerintah daerah Blora sebagai fasilitator dan koordinator untuk mengoptimalkan kerjasama masyarakat dan sektor swasta. Sinergi yang terbangun berpotensi mendorong pengembangan potensi wisata secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Penelitian *Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran: Analisis Dampak Digitalisasi Desa Wisata* memberikan perspektif penting mengenai peran teknologi dalam meningkatkan efektivitas kolaborasi antar pemangku kepentingan. Implementasi digitalisasi di Desa Wisata Balong dapat memperluas jangkauan promosi melalui media sosial, website desa, dan platform pemasaran digital. Teknologi juga membuka peluang transparansi dan koordinasi dalam pengelolaan, sehingga partisipasi masyarakat dapat terwujud secara optimal.

Penelitian di Desa Wisata Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang menunjukkan keberhasilan pengelolaan pariwisata berbasis komunitas sangat bergantung pada koordinasi solid berbagai aktor. Desa Kemetul membangun kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan

wisata. Desa Wisata Balong dapat mengadopsi model ini dengan mendorong keterlibatan langsung masyarakat agar manfaat ekonomi dirasakan secara merata.

Studi Desa Wisata Gubugklakah, Kabupaten Malang, menegaskan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi lokal dan pelestarian lingkungan. Konteks Desa Wisata Balong memerlukan pendekatan serupa dengan pengelolaan sumber daya alam secara bijak agar dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalisir.

Penelitian Sustainable Regional Development Through the Development of Smart Village and Smart Branding: A Case Study of Bangsri Village, Blora Regency menunjukkan penerapan teknologi cerdas dan branding inovatif mampu mengubah desa menjadi destinasi modern dan berdaya saing. Desa Wisata Balong dapat belajar dari pengalaman Bangsri dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan layanan wisata, memperkuat identitas lokal melalui branding menarik, dan mengintegrasikan teknologi dalam promosi.

Pengembangan Desa Wisata Balong memerlukan proses tata kelola kolaboratif yang terstruktur dan sinergis. Pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan sektor swasta perlu membangun komitmen bersama dalam mengelola potensi wisata secara berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana promosi dan penguatan branding mampu meningkatkan daya tarik sekaligus memperluas pasar. Model tata kelola kolaboratif di Desa Wisata Balong perlu menekankan kolaborasi multiaktor dengan pendekatan berbasis komunitas. Keberhasilan model ini ditentukan oleh keterlibatan aktif masyarakat, pemanfaatan teknologi yang tepat, serta dukungan penuh pemerintah dan sektor swasta. Pengembangan Desa

Wisata Balong diharapkan memberi dampak positif jangka panjang bagi perekonomian lokal, kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian alam dan budaya.

1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan disiplin ilmu yang membahas tentang bagaimana kebijakan publik dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam konteks organisasi publik, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Administrasi publik mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Sebagai cabang ilmu sosial yang berfokus pada tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, administrasi publik memiliki peran penting dalam memastikan bahwa sumber daya publik dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Secara etimologis, kata “administrasi” berasal dari bahasa Latin, yang terdiri dari dua bagian, yaitu “*ad*” dan “*ministrare*,” yang memiliki arti “melayani” dan “memenuhi.” Dalam bahasa Inggris, kata ini diterjemahkan menjadi “*administration*,” yang menurut Atmosudirjo (dalam Meutia, 2017) mengacu pada rangkaian tindakan yang mencakup pengelolaan, kepemimpinan, pelaksanaan, serta pengaturan. Intinya, administrasi mencakup kegiatan untuk mengarahkan dan memimpin suatu upaya demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, istilah “publik” berasal dari bahasa Inggris “*public*,” yang mengacu pada sesuatu yang bersifat umum, melibatkan masyarakat luas, atau berkaitan dengan pemerintahan dan negara. Menurut pandangan Nicholas yang dikutip oleh Pasolong (2019), administrasi publik adalah kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan memperdalam pemahaman tentang pemerintahan dalam

kaitannya dengan masyarakat yang dipimpinnya, serta mendorong kebijakan publik agar lebih tanggap terhadap kebutuhan sosial. Chandler dan Plano (dalam Pasolong, 2019) menyebutkan bahwa Dwight Waldo pada tahun 1968 mengartikan administrasi publik sebagai seni dan ilmu yang berfokus pada pengelolaan urusan publik dan pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan.

Definisi ini menekankan bahwa administrasi publik merupakan proses pengelolaan dan organisasi yang melibatkan manusia serta sumber daya lain untuk mencapai tujuan pemerintahan. Selain itu, Edward H. Litchfield (dalam Meutia, 2017) mengemukakan bahwa administrasi publik adalah studi mengenai cara pengaturan, pendanaan, kepemimpinan, dan pengelolaan tenaga kerja dalam lembaga pemerintah. Berdasarkan berbagai pandangan ini, administrasi publik dapat dipahami sebagai upaya penyelesaian masalah publik melalui perbaikan dalam organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintahan. Dengan demikian, administrasi publik mencakup kepentingan publik secara luas, yang melibatkan sektor pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Setiap disiplin ilmu pasti mengalami pergeseran paradigma, dan hal ini terjadi dengan alasan yang jelas. Pergeseran tersebut terjadi karena paradigma lama tidak lagi mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga paradigma baru pun muncul. Paradigma itu sendiri merupakan cara pandang, nilai-nilai, metode, dan prinsip dasar yang digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat pada suatu waktu tertentu. Dalam perkembangan ilmu administrasi publik, ada enam paradigma yang masing-masing membawa prinsip

yang berbeda. Administrasi publik adalah bidang ilmu yang senantiasa berubah dan berkembang. Setiap perubahan paradigma mencerminkan pandangan para ahli mengenai peran dan hambatan administrasi publik dalam menghadapi masalah-masalah baru. Perubahan paradigma ini selalu hadir sebagai respons terhadap hambatan yang terus datang. Dalam beberapa literatur, terdapat enam paradigma yang berkembang dalam administrasi publik. Nicolas Henry mengidentifikasi enam paradigma tersebut, yaitu:

1. Paradigma 1 (Dikotomi Politik-Administrasi) : Paradigma ini pertama kali diperkenalkan melalui karya Goodnow (2003) dan White (1926), yang memisahkan dua fungsi negara, yaitu politik dan administrasi. Fokus dari paradigma ini adalah pada birokrasi pemerintah sebagai pusat administrasi publik.
2. Paradigma 2 (Prinsip-Prinsip Administrasi) : Tokoh seperti Willoughby, Gullick, dan Urwick memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi yang terkenal dengan akronim POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*). Dalam paradigma ini, administrasi publik lebih difokuskan pada fungsi manajerial, dengan lokus yang lebih bersifat umum, tidak terikat pada satu tempat atau organisasi tertentu.
3. Paradigma 3 (Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik) : Marx (1959) dan Simon (1946) berpendapat bahwa pemisahan antara politik dan administrasi tidak realistis. Gaus (1931) mengembangkan pandangan bahwa administrasi publik adalah bagian dari ilmu politik, dengan fokus pada manajemen dan birokrasi pemerintahan.

4. Paradigma 4 (Administrasi Publik sebagai Manajemen) : Paradigma ini mengembangkan prinsip-prinsip yang telah ada sebelumnya, dengan fokus yang lebih besar pada analisis perilaku organisasi, manajemen, penerapan teknologi, dan riset operasi. Fokus dari paradigma ini lebih fleksibel, sehingga lokus administrasi publik menjadi tidak terdefinisi dengan jelas.
5. Paradigma 5 (Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik) : Pada paradigma ini, fokus dan lokus administrasi publik sudah lebih jelas. Fokusnya mencakup teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik, sedangkan lokusnya adalah pada masalah dan kepentingan publik.
6. Paradigma 6 (Tata Kelola) : Paradigma ini merupakan perkembangan terbaru dalam administrasi publik, yang membahas bagaimana negara harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk mencapai kepuasan publik. Paradigma ini menekankan pentingnya pelayanan publik yang maksimal.

Paradigma Tata Kelola (*Governance*) menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan desa wisata, pendekatan ini menjadi relevan karena mendorong sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas tata kelola dan inovasi destinasi wisata. Prinsip utama dalam paradigma tata kelola mencakup keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, serta koordinasi antaraktor. Penerapan model proses kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Balong memungkinkan optimalisasi potensi wisata melalui strategi berbasis inklusivitas dan keberlanjutan. Keterlibatan multiaktor dalam

perencanaan, pengelolaan, dan pemasaran dapat meningkatkan daya saing desa wisata, menjadikannya destinasi unggulan yang mampu beradaptasi dengan dinamika industri pariwisata modern.

1.5.4 Manajemen Publik

Manajemen publik merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu administrasi negara yang berfokus pada pengelolaan sumber daya publik guna mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Para ahli memberikan berbagai pandangan mengenai pengertian manajemen publik, yang secara umum menitikberatkan pada efektivitas, efisiensi, serta pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Frederickson (1997), manajemen publik adalah proses pengelolaan organisasi publik yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya publik dengan tujuan mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, Henry (2004) mendefinisikan manajemen publik sebagai seni dan ilmu dalam mengelola kebijakan, program, dan sumber daya pemerintah secara efektif dan efisien, dengan fokus utama pada pelayanan kepada masyarakat.

Dwiyanto (2008) menjelaskan bahwa manajemen publik merupakan proses pengelolaan pelayanan publik secara optimal melalui koordinasi berbagai aktor dan pemangku kepentingan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Hughes (2003) menyatakan bahwa manajemen publik berfokus pada penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam sektor publik untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara umum, manajemen publik melibatkan beberapa elemen penting yang harus dijalankan secara terpadu, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,

dan pengendalian. Perencanaan merupakan tahap perumusan tujuan dan strategi yang akan dicapai. Pada tahap pengorganisasian, dilakukan pengaturan sumber daya serta pembagian tugas secara terstruktur agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan optimal. Selanjutnya, pengarahan dilakukan dengan memberikan bimbingan serta motivasi kepada anggota organisasi agar bekerja secara maksimal. Terakhir, pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh rencana terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan melalui pemantauan dan evaluasi secara berkala.

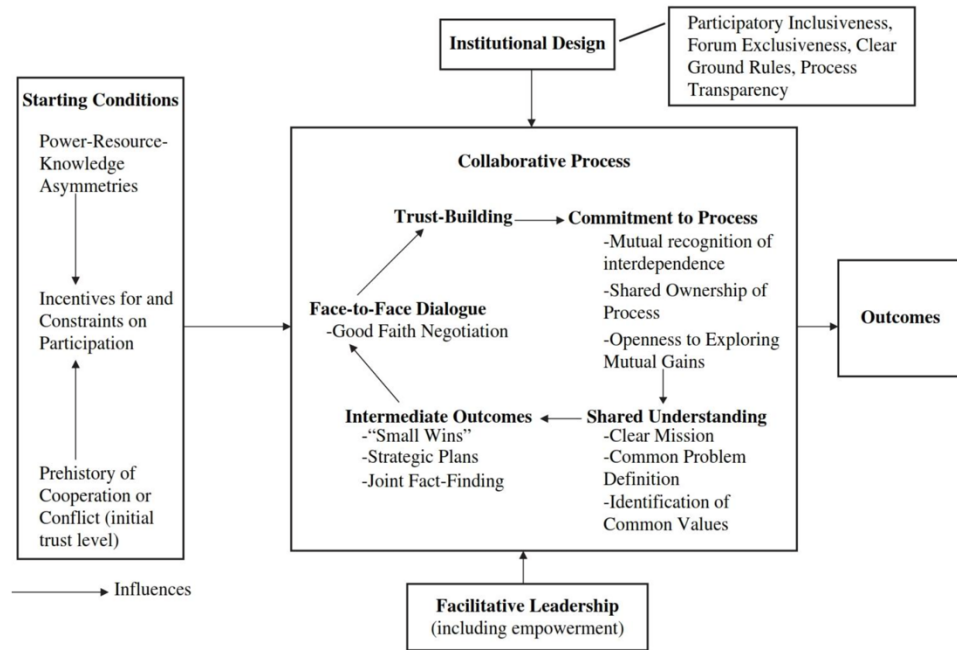
Dalam konteks penelitian terkait proses kolaborasi pada pengembangan pariwisata desa, seperti pada kasus Pengembangan Pariwisata Desa Balong Jepun di Kabupaten Blora, penerapan prinsip manajemen publik memiliki relevansi yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan penerapan manajemen publik dapat meningkatkan efektivitas tata kelola dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, penerapan prinsip manajemen publik mampu mengoptimalkan sumber daya lokal melalui perencanaan yang partisipatif dan pengorganisasian yang terstruktur. Prinsip-prinsip tersebut juga dapat mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mampu mendukung keberlanjutan potensi pariwisata desa secara berkelanjutan.

1.5.5 Collaborative Governance

Collaborative governance muncul sebagai pendekatan strategis dalam menangani persoalan-persoalan yang memiliki kompleksitas dan dinamika tinggi, yang tidak dapat diselesaikan secara efektif oleh pemerintah sendiri. Konsep ini menghadirkan mekanisme kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak melalui

kerjasama, komunikasi, dan koordinasi yang mendalam. Kolaborasi tersebut mencakup aktor-aktor yang secara langsung maupun tidak langsung terhubung, baik yang memperoleh efek maupun yang memperoleh manfaat dari proses penyelesaian masalah (Haryono, 2012).

Collaborative governance adalah suatu pendekatan pengaturan yang melibatkan lembaga publik dan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pembuatan kebijakan yang formal, konsensus, dan deliberatif, dengan tujuan untuk mengembangkan atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program publik, atau mengatur asset (Ansell & Gash, 2008). Selanjutnya menurut Agrawal dan Lemos (dalam Astuti et al., 2020), *collaborative governance* melampaui batas konvensional antara pemerintah dan non-pemerintah. Konsep ini mencerminkan model “multipartner governance” yang mengintegrasikan beragam aktor, meliputi sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas lokal. *Collaborative governance* berlandaskan atas dasar integrasi antar pemangku kepentingan dan pendekatan perencanaan “*hybrid*” yang memadukan dinamika lintas sektor, seperti kerja sama antara domain publik, privat, dan sosial. Sejalan dengan itu, Balogh et al (dalam Astuti et al., 2020) menjelaskan *collaborative governance* merupakan pendekatan integratif dalam manajemen dan perumusan kebijakan publik yang mensinergikan aktor-aktor dari bermacam level dan domain. Konsep ini menghadirkan mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan secara konstruktif para pemangku kepentingan dari ranah pemerintahan, instansi publik, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Visi utamanya adalah menggapai solusi dan output yang kompleks dan komprehensif, yang tidak mungkin diwujudkan secara mandiri oleh satu pihak atau satu institusi.



Sumber : Ansell & Gash (2008)

Dalam jurnal berjudul “*Collaborative Governance in Theory and Practice*”, Ansell & Gash (2008) melakukan perumusan model *collaborative governance* melalui penelaahan mendalam terhadap berbagai literatur yang ada. Dari studi literatur tersebut, mereka berhasil mengidentifikasi dan merumuskan 4 (empat) variabel pokok yang menjadi landasan utama model *collaborative governance*, yaitu *Starting Conditions*, *Institutional Design*, *Facilitative Leadership*, dan *Collaborative Process*. Inti dari model tersebut adalah variabel Collaborative Process dengan proses berupa *Face-to-Face Dialogue*, *Trust-Building*, *Commitment to Process*, *Shared Understanding*, dan *Intermediate Outcomes*.

1.5.6 Proses Kolaboratif

Menurut Ansell & Gash (2008), *collaborative governance* dipahami sebagai model tata kelola yang melibatkan aktor negara maupun non-negara dalam suatu forum pengambilan keputusan publik yang bersifat deliberatif, partisipatif, dan berorientasi pada konsensus. Mereka merumuskan kerangka kerja yang terdiri dari

empat komponen utama, yaitu kondisi awal (*starting conditions*), desain kelembagaan (*institutional design*), kepemimpinan (*leadership*), dan proses kolaborasi (*collaborative process*). Dari keempatnya, proses kolaborasi dipandang sebagai inti karena di dalamnya terjadi dinamika interaksi antaraktor yang bersifat siklik dan berulang, bukan linear. Proses ini menekankan pada bagaimana aktor-aktor dengan kepentingan berbeda mampu menjalin komunikasi, membangun kepercayaan, memperkuat komitmen, serta menciptakan pemahaman bersama yang berujung pada pencapaian hasil kolektif. Dengan kata lain, *collaborative process* bukan sekadar rangkaian prosedur, tetapi sebuah mekanisme sosial-politik yang menentukan efektivitas kolaborasi.

Ansell & Gash 2008 menjelaskan mengenai tahapan proses kolaborasi yang meliputi beberapa fase penting.

a. Dialog Tatap Muka

Ansell & Gash (2008) menekankan bahwa setiap proses kolaboratif berawal dari dialog tatap muka antar pemangku kepentingan. Dialog ini bukan sekadar forum untuk bernegosiasi, melainkan sarana komunikasi langsung yang memungkinkan aktor-aktor yang berbeda kepentingan saling bertemu, saling mendengarkan, dan mencoba memahami satu sama lain. Melalui dialog semacam ini, hambatan komunikasi dan stigma yang seringkali menghalangi kerja sama dapat dipecah. Dialog tatap muka berfungsi membangun dasar kepercayaan, rasa hormat, dan pemahaman bersama yang nantinya menjadi fondasi bagi lahirnya kesepakatan. Walaupun dialog bukan satu-satunya faktor, hampir mustahil membayangkan kolaborasi yang berhasil tanpa adanya pertemuan langsung yang mendalam.

b. Membangun Kepercayaan

Unsur penting lain dalam proses kolaboratif adalah kepercayaan. Ansell dan Gash melihat bahwa kolaborasi biasanya dimulai dari kondisi yang penuh dengan ketidakpercayaan dan kecurigaan. Oleh sebab itu, membangun kepercayaan membutuhkan waktu panjang, konsistensi, dan komitmen jangka panjang, terlebih jika sebelumnya ada sejarah konflik di antara para pihak. Kepercayaan ini lahir dari pengalaman bekerja sama secara terbuka, prosedur yang adil, serta adanya kepastian bahwa tidak ada pihak yang dimanipulasi. Tanpa adanya kepercayaan, kolaborasi akan mudah goyah karena setiap pihak hanya berfokus pada risiko dan potensi kerugian. Sebaliknya, jika kepercayaan berhasil dibangun, aktor-aktor akan lebih berani mengambil risiko untuk bekerja sama dan membuka diri terhadap kepentingan bersama.

c. Komitmen dan Proses

Selain kepercayaan, komitmen terhadap proses juga menjadi faktor krusial. Komitmen bukan hanya berarti hadir dalam pertemuan, melainkan benar-benar meyakini bahwa bernegosiasi dengan itikad baik adalah cara terbaik mencapai hasil kebijakan yang diinginkan. Komitmen ini menuntut kesiapan untuk menerima arah pembahasan, meskipun kadang hasilnya tidak sepenuhnya sejalan dengan posisi awal masing-masing pihak. Lebih jauh, komitmen menciptakan *ownership* atau kepemilikan bersama atas proses. Artinya, keputusan yang dihasilkan bukan hanya milik pemerintah atau pihak dominan tertentu, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif semua aktor yang terlibat. Dengan adanya komitmen seperti ini, para pemangku kepentingan merasa tidak lagi sebagai pengamat luar, melainkan bagian yang berperan aktif dalam

menentukan hasil bersama.

d. Pemahaman Bersama

Dalam setiap proses kolaboratif, pemahaman bersama merupakan elemen penting yang mengarahkan kerja sama. Ansell dan Gash menjelaskan bahwa pemahaman bersama dapat berupa kesepakatan atas tujuan, visi, definisi masalah, atau strategi yang ditempuh. Pemahaman ini diperlukan agar setiap pihak tidak berjalan dengan agenda sendiri-sendiri. Ketika visi dan tujuan sudah diselaraskan, kolaborasi menjadi lebih terarah dan kohesif. Selain itu, pemahaman bersama merupakan bagian dari proses pembelajaran kolektif, di mana para pihak tidak hanya menyelesaikan masalah teknis, tetapi juga mengembangkan kemampuan untuk melihat persoalan dari perspektif orang lain, menemukan nilai-nilai yang sejalan, dan membangun kapasitas bekerja sama dalam jangka panjang.

e. Hasil Antara (Pertengahan)

Terakhir, Ansell dan Gash menekankan pentingnya hasil sementara atau *intermediate outcomes* yang sering disebut sebagai “kemenangan kecil”. Hasil sementara berfungsi sebagai bukti nyata bahwa kolaborasi menghasilkan sesuatu yang konkret, meskipun kecil. Keberhasilan awal ini memiliki peran penting dalam menumbuhkan kepercayaan, memperkuat komitmen, dan menjaga semangat kolaborasi tetap hidup. Bahkan, dalam situasi di mana tingkat permusuhan dan ketidakpercayaan tinggi, keberhasilan kecil ini bisa menjadi prasyarat mutlak agar kolaborasi tidak runtuh di tengah jalan. Dengan adanya hasil sementara, para pihak termotivasi untuk melanjutkan kerja sama karena merasa bahwa proses yang mereka jalani benar-benar bermakna dan

memberi dampak.

1.5.6 Faktor Mempengaruhi Proses Kolaborasi

Ansell & Gash (2008) menempatkan tiga variabel kontingensi sebagai penentu utama keberhasilan dinamika kolaborasi, yaitu kondisi awal (*starting conditions*), desain kelembagaan (*institutional design*), dan kepemimpinan (*facilitative leadership*). Kondisi awal menciptakan konteks dasar terkait asimetri kekuasaan dan sejarah hubungan antaraktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan mula-mula. Desain kelembagaan menyediakan kerangka struktural berupa aturan main (*ground rules*) untuk menjamin transparansi serta inklusivitas forum. Kepemimpinan memiliki peran vital sebagai katalisator dalam memediasi dialog dan menjaga komitmen para pihak di tengah perbedaan kepentingan. Sinergi ketiga faktor eksternal ini secara langsung mendikte efektivitas siklus kolaborasi dalam mencapai hasil kolektif.

1. Kondisi Awal (*Starting Conditions*)

Kondisi awal (*starting conditions*) memiliki peran krusial dalam menentukan keberhasilan proses kolaborasi antara pemangku kepentingan, termasuk lembaga atau organisasi. Ansell & Gash (2008) mengidentifikasi tiga variabel utama dalam kondisi awal ini:

- a. Ketidakseimbangan dalam Pengaruh, Sumber Daya, dan Pengetahuan
Perbedaan dalam kekuatan dan akses terhadap sumber daya dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam proses kolaborasi, yang dapat menghambat atau memperkuat peran pemangku kepentingan.
- b. Sejarah Hubungan Masa Lalu
Riwayat kerja sama atau konflik sebelumnya mempengaruhi tingkat

kepercayaan dan kemauan untuk berkolaborasi. Hubungan positif dapat memperkuat keterlibatan, sementara konflik dapat menjadi hambatan.

c. Dorongan dan Kendala dalam Partisipasi

Faktor pendorong dan hambatan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun regulasi, mempengaruhi keterlibatan pemangku kepentingan dalam kolaborasi.

2. Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)

Desain kelembagaan merupakan elemen kunci dalam *collaborative governance*, berfungsi sebagai aturan dasar yang memberikan legitimasi prosedural dalam proses kerja sama. Desain ini mencakup beberapa aspek penting yang memastikan kolaborasi berjalan efektif dan transparan.

a. Aturan Partisipasi dalam Kolaborasi

Aturan partisipasi menentukan siapa saja yang berhak atau diharapkan terlibat dalam proses kolaborasi. Kejelasan aturan ini memastikan bahwa semua pemangku kepentingan yang relevan dapat berkontribusi secara efektif. Ansell & Gash (2008) menekankan bahwa desain kelembagaan harus mencakup aturan dasar yang jelas dan konsisten untuk memastikan partisipasi yang inklusif dan adil.

b. Pembentukan Forum Kolaborasi

Forum kolaborasi berfungsi sebagai wadah bagi para pemangku kepentingan untuk berdiskusi, merumuskan kebijakan, dan membuat keputusan bersama. Pembentukan forum yang efektif memungkinkan dialog terbuka dan konstruktif. Penelitian menunjukkan bahwa forum kolaboratif yang terdiri dari perwakilan setiap pemangku kepentingan dapat

memberikan inovasi dan solusi yang lebih baik dalam pengelolaan isu-isu publik.

c. Kejelasan Aturan Pelaksanaan

Aturan pelaksanaan yang jelas dan konsisten sangat penting untuk menghindari kebingungan dan konflik selama proses kolaborasi. Ansell & Gash (2008) menekankan pentingnya aturan dasar yang jelas untuk memastikan bahwa semua pihak memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam kolaborasi.

d. Transparansi dalam Proses Pelaksanaan Kolaborasi

Transparansi memastikan bahwa semua proses dan keputusan dalam kolaborasi dapat diakses dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Hal ini membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi aktif. Penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam proses kolaborasi meningkatkan kepercayaan antar pemangku kepentingan dan efektivitas implementasi kebijakan.

3. Kepemimpinan (*Facilitative Leadership*)

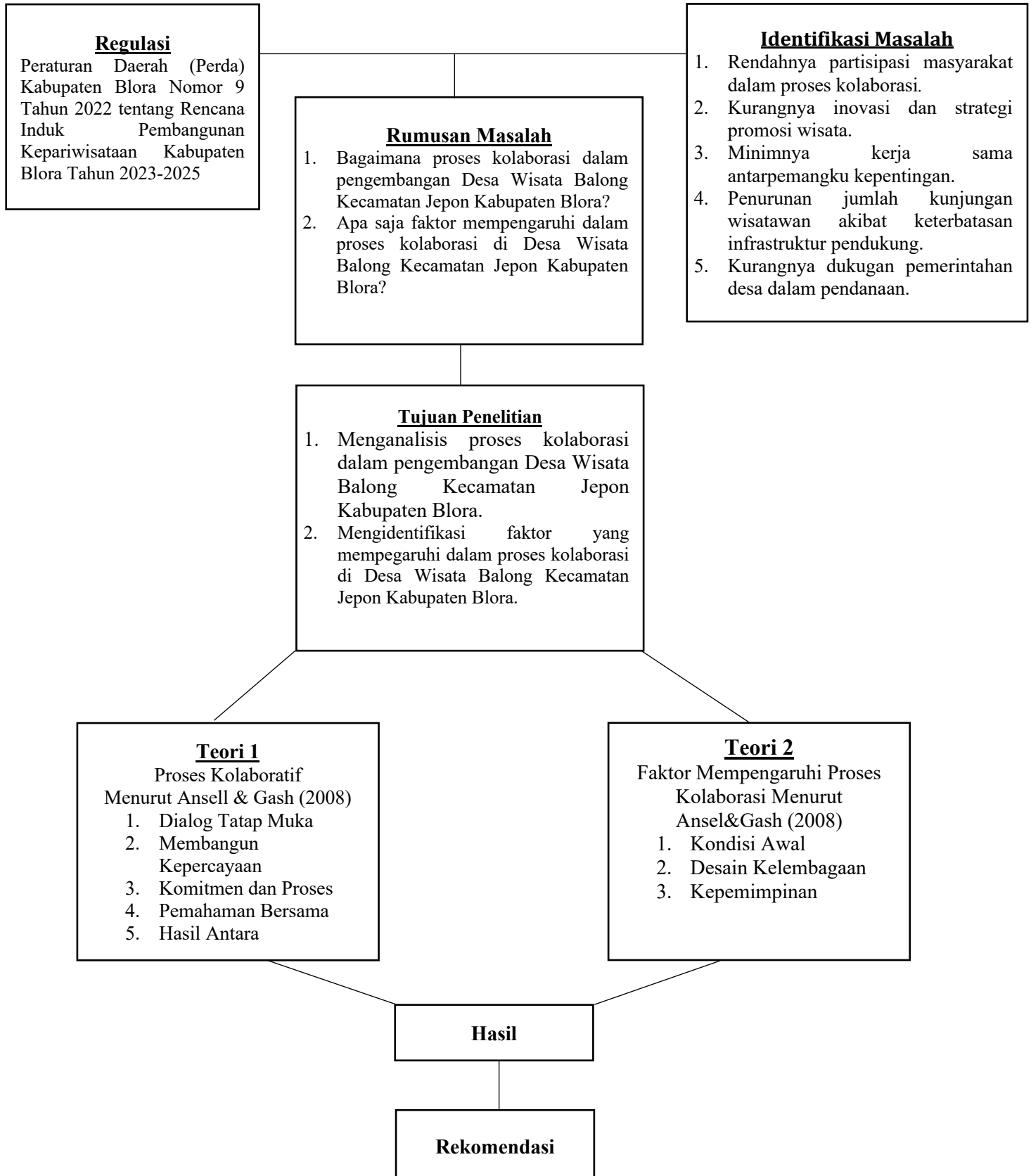
Kepemimpinan memiliki peran penting dalam kolaborasi, terutama dalam mengatasi konflik dan membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan. Ansell & Gash (2008) mengidentifikasi tiga peran utama pemimpin dalam kolaborasi:

- (1) pemimpin sebagai pelayan yang memastikan partisipasi semua pihak,
- (2) pemimpin sebagai pemberdaya yang mendorong keterlibatan aktif, dan
- (3) pemimpin sebagai penengah dalam konflik.

Kepercayaan menjadi elemen kunci dalam kolaborasi yang sukses

(Lawrence, 2017), di mana pemimpin harus mampu menciptakan keterbukaan, komunikasi efektif, dan menjaga transparansi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, strategi manajemen konflik yang tepat dapat meningkatkan kerja sama dan memperbaiki hubungan antar pemangku kepentingan (Ansell & Gash, 2008). Pemimpin yang berasal dari komunitas pemangku kepentingan sering kali lebih dihormati dan dipercaya karena pemahaman mereka terhadap konteks lokal (Lawrence, 2017). Oleh karena itu, kepemimpinan yang kuat dan kolaboratif menjadi faktor utama dalam memastikan keberhasilan suatu kerja sama.

1.5.6 Kerangka Pikir Teoritis



1.6 Oprasionalisasi Konsep

1.6.1 Proses Kolaboratif

Proses kolaboratif dipahami sebagai suatu mekanisme tata kelola yang menekankan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan melalui dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, penciptaan pemahaman kolektif, serta pencapaian hasil sementara yang mampu menjaga momentum kerja sama. Proses ini tidak berlangsung secara linier, melainkan berbentuk siklus yang menekankan pentingnya komunikasi berkelanjutan, keadilan prosedural, dan rasa memiliki bersama terhadap keputusan yang diambil. Dalam penelitian ini, proses kolaboratif dimaknai sebagai upaya sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengelola Desa Wisata Balong di Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora secara inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Melalui keterlibatan langsung, pembagian tanggung jawab yang adil, serta penciptaan kesepahaman bersama, proses ini diharapkan mampu memperkuat daya saing pariwisata desa sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara kolektif.

1.6.2 Faktor Mempengaruhi Proses Kolaborasi

Faktor yang mempengaruhi proses kolaborasi dipahami sebagai aspek-aspek determinan yang meliputi kondisi awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan fasilitatif yang berperan dalam membentuk dinamika kerja sama. Ketiga elemen ini berfungsi sebagai landasan konteks yang menentukan kelancaran interaksi serta kemampuan para pihak dalam memecahkan masalah bersama. Penelitian ini memaknai faktor-faktor tersebut sebagai prasyarat penting dalam memahami tata kelola di Desa Wisata Balong, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora.

Fokus analisis mencakup penelusuran mendalam terhadap riwayat hubungan dan kesetaraan kekuatan antaraktor, kejelasan aturan main dalam forum musyawarah, serta peran strategis pemimpin lokal dalam memediasi kepentingan antara pemerintah desa, kelompok pengelola, dan masyarakat demi terciptanya sinergi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Operasional konsep dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis fenomena-fenomena yang akan dianalisis terkait implementasi proses kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Balong, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Untuk itu, definisi operasional disusun dengan menguraikan fenomena utama dan gejala yang relevan, serta sub-gejala yang dapat guna memberikan kejelasan dalam pengumpulan dan analisis data. Tabel berikut menyajikan fenomena, sub-fenomena, serta gejala yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1. 5 Oprasionalisasi Konsep

FENOMENA	GEJALA	SUB-GEJALA
Proses Kolaboratif	Dialog Tatap Muka	1. Intensitas dan Keberlanjutan Pertemuan 2. Kualitas Partisipasi Aktor dalam Dialog 3. Substansi dan Orientasi Dialog
	Membangun Kepercayaan	1. Kerja Sama yang Terbuka dan Jujur 2. Adil dan Transparan 3. Konsistensi dalam Tindak Lanjut Kesepakatan
	Komitmen dan Proses	1. Keterbukaan dalam Bernegosiasi 2. Kepemilikan Bersama atas Keputusan 3. Partisipasi Aktif dalam Proses Pengambilan Keputusan
	Pemahaman Bersama	1. Kesepakatan Tujuan Kolektif 2. Definisi Masalah yang Sama 3. Pembelajaran Kolektif
	Hasil Antara	1. Pencapaian Kecil yang Kongkrit 2. Peningkatan Motivasi Kolektif

FENOMENA	GEJALA	SUB-GEJALA
		3. Penguatan Siklus Positif
Faktor Mempengaruhi Proses Kolaborasi	Kondisi Awal	1. Ketimpangan Peran dan Akses Sumber Daya Antaraktor 2. Riwayat Interaksi dan Kerja Sama Antar Pemangku Kepentingan 3. Motivasi dan Hambatan Keterlibatan Aktor Lokal
	Desain Kelembagaan	1. Kejelasan Aturan Keterlibatan dalam Kolaborasi 2. Efektivitas Forum Kolaborasi Desa Wisata 3. Transparansi dan Kejelasan Mekanisme Pelaksanaan
	Kepemimpinan	1. Peran Pemimpin Memfasilitasi Keterlibatan Aktor 2. Peran Pemimpin Membangun Kepercayaan dan Komunikasi 3. Peran Pemimpin Mengelola Perbedaan dan Konflik Kepentingan

1.7 Argumen Penelitian

Keberhasilan desa wisata tidak semata ditentukan oleh potensi alam dan budaya, tetapi lebih pada efektivitas proses kolaborasi yang berlangsung di antara para pemangku kepentingan. Ansell & Gash (2008) menekankan bahwa inti dari kolaborasi terletak pada tahapan proses yang meliputi dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, serta pencapaian hasil antara yang menjadi penguat keberlanjutan. Kolaborasi, oleh karena itu, tidak dapat dipahami sekadar sebagai forum formal, melainkan sebagai interaksi berulang yang secara gradual membentuk legitimasi, kesepahaman, dan rasa saling percaya.

Tahapan proses kolaborasi di Desa Wisata Balong, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, faktanya masih menghadapi sejumlah hambatan mendasar. Dialog antarpemangku kepentingan berlangsung terbatas dan cenderung seremonial, sehingga tidak cukup mendorong pembentukan kepercayaan yang kuat.

Komitmen jangka panjang pun mudah melemah akibat minimnya dukungan anggaran serta lemahnya strategi promosi digital. Absennya pemahaman bersama mengenai visi pengembangan desa wisata semakin memperburuk situasi karena menyebabkan perencanaan dan implementasi berjalan secara sektoral dan parsial. Kondisi ini mengindikasikan bahwa stagnasi pengembangan Desa Wisata Balong bukanlah akibat terbatasnya potensi lokal, melainkan karena proses kolaborasi yang belum optimal pada tiap tahapannya.

Penelitian ini berargumen bahwa analisis kritis terhadap dinamika setiap tahapan proses kolaborasi menjadi kunci dalam merumuskan strategi penguatan tata kelola yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Rekomendasi kebijakan yang tidak hanya mengatasi hambatan teknis, tetapi juga membangun pondasi sosial-politik bagi keberlangsungan desa wisata, dapat dirumuskan dengan memperhatikan titik-titik lemah dalam dialog, kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian kualitatif didasarkan pada filsafat *postpositivisme* dan digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian. Sementara itu, Bodgan dan Taylor (dalam Moleong, 2019) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa informasi dan perilaku yang diamati. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu fenomena atau hubungan antara dua atau

lebih fenomena yang dikaji.

Metode penelitian kualitatif deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi mengenai kondisi dan fenomena yang terjadi berdasarkan situasi penelitian. Penelitian ini melibatkan observasi lapangan guna memperoleh data yang konkret dan akurat sebagai bahan kajian. Data yang diperoleh melalui observasi lapangan disebut sebagai data primer karena bersumber langsung dari narasumber. Selain itu, penelitian ini juga mencakup proses dokumentasi, yang berfungsi untuk memverifikasi keakuratan data sehingga memudahkan dalam proses deskripsi. Penelitian ini, peneliti berusaha untuk menganalisis mengenai proses kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Balong Kecamatan Jepon Kabupaten Blora.

1.8.2 Situs Penelitian

Menurut Sugiyono (2019), situs penelitian adalah tempat berlangsungnya kegiatan penelitian di mana peneliti melakukan observasi, wawancara, serta pengumpulan data yang relevan dengan fokus penelitian. Lokasi penelitian dipahami sebagai ruang lingkup wilayah yang dipilih peneliti karena dianggap dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Penentuan situs dan lokasi penelitian tidak semata bersifat teknis, tetapi memiliki implikasi metodologis yang menentukan kualitas dan kedalaman temuan penelitian.

Penelitian ini menetapkan Desa Wisata Balong, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora sebagai lokasi utama. Pemilihan desa ini didasarkan pada representasi problematika nyata dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. Pengelolaan potensi utama berupa kerajinan tanah liat dan kekayaan budaya lokal belum berjalan optimal akibat keterbatasan anggaran, infrastruktur

yang belum memadai, serta lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan. Desa Balong, akibat kondisi tersebut, menjadi *locus* yang relevan untuk menelaah dinamika kolaborasi dalam pengelolaan destinasi wisata.

Fokus situs penelitian diarahkan pada lingkup kelembagaan Desa Wisata Balong, khususnya Pemerintah Desa Balong dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Kedua aktor ini dipandang sebagai sektor utama dalam pengembangan desa wisata, meskipun efektivitas perannya masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya, fragmentasi peran, dan rendahnya pemahaman bersama mengenai visi pembangunan. Analisis yang lebih mendalam mengenai efektivitas proses kolaborasi, faktor penghambat, serta strategi penguatan tata kelola kolaboratif dimungkinkan melalui pemfokusan pada aktor-aktor tersebut.

Penetapan situs dan lokasi tersebut mengarahkan penelitian ini tidak hanya untuk mendeskripsikan fenomena, tetapi juga untuk melakukan analisis kritis terhadap kondisi objektif di lapangan. Temuan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan juga mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi penguatan tata kelola desa wisata berbasis kolaborasi yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang juga disebut sebagai informan, merujuk pada individu atau kelompok dalam lingkungan penelitian yang berperan dalam memberikan informasi relevan mengenai situasi dan kondisi penelitian (Moleong, 2019). Pemilihan subjek dalam penelitian ini didasarkan pada tema yang dikaji, yaitu penerapan proses kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Balong di Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam penentuan subjek, yaitu pemilihan sumber data berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan topik penelitian Sugiyono (2019), Informan yang dipilih merupakan individu yang memiliki pemahaman mendalam dan keterlibatan langsung dalam proses tata kelola kolaboratif desa wisata.

Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan mengacu pada pendekatan *pentahelix*, yang merupakan model kolaborasi multipihak dalam pembangunan berbasis inovasi. Model ini melibatkan lima unsur utama: pemerintah (*government*), masyarakat (*community*), akademisi (*academia*), pelaku usaha (*business*), dan media (dalam konteks ini direpresentasikan melalui wisatawan sebagai pengguna informasi dan penerima manfaat). Keterlibatan kelima unsur ini memungkinkan pencapaian tata kelola desa wisata yang inklusif dan berkelanjutan. Subjek penelitian dalam studi ini meliputi:

1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Blora

Dipilih karena memiliki kewenangan dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata di tingkat kabupaten. Perspektif dari Dinas Pariwisata penting untuk memahami arah kebijakan makro, bentuk dukungan pemerintah daerah, serta sejauh mana program tersebut disinergikan dengan pengelolaan desa wisata berbasis kolaborasi.

2. Kepala Desa Balong

Sebagai pemimpin pemerintahan desa, Kepala Desa berperan strategis dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah. Wawancara dengan Kepala Desa dapat memberikan pemahaman terkait dinamika pengambilan keputusan di tingkat lokal, komitmen dalam

mengembangkan desa wisata, serta tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan berbagai aktor.

3. Pengelola Desa Wisata Balong atau Pokdarwis

Pokdarwis menjadi aktor inti yang menggerakkan aktivitas wisata sehari-hari. Informasi dari pengelola sangat relevan untuk menelaah bagaimana praktik kolaborasi dilaksanakan, bentuk partisipasi masyarakat yang difasilitasi, serta inovasi atau kendala yang muncul dalam operasionalisasi desa wisata.

4. Pelaku usaha lokal di Desa Wisata Balong

Pelaku usaha lokal merupakan representasi sektor ekonomi yang mendapat dampak langsung dari pengembangan desa wisata. Wawancara dengan mereka penting untuk memahami kontribusi dunia usaha, pola kemitraan yang terjalin, serta sejauh mana kebijakan desa wisata mendukung keberlangsungan ekonomi lokal.

5. Masyarakat Desa Balong yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan wisata

Partisipasi masyarakat merupakan pilar utama dalam pendekatan *community-based tourism*. Pemilihan informan dari masyarakat yang aktif akan memperlihatkan sejauh mana kolaborasi benar-benar dirasakan di tingkat akar rumput, baik dari sisi manfaat, tantangan, maupun tingkat kepercayaan dan komitmen terhadap proses bersama.

6. Wisatawan atau pengunjung Desa Wisata Balong

Wisatawan menjadi pihak yang menilai langsung kualitas dan daya tarik desa wisata. Perspektif mereka diperlukan untuk menilai hasil kolaborasi dari sisi pengguna, seperti kepuasan layanan, pengalaman berwisata, serta keberlanjutan daya tarik wisata Desa Balong.

7. Akademisi atau pihak eksternal yang pernah melakukan pendampingan/penelitian

Keterlibatan akademisi atau pihak eksternal memberi dimensi objektif dalam evaluasi pengelolaan desa wisata. Mereka dapat menjelaskan praktik kolaborasi berdasarkan kajian ilmiah maupun pengalaman pendampingan, sehingga melengkapi gambaran mengenai faktor pendukung, hambatan, serta rekomendasi perbaikan dalam kerangka proses kolaborasi. Struktur subjek ini diharapkan mencerminkan keterwakilan aktor-aktor kunci dalam kerangka proses kolaborasi sehingga memungkinkan pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika kolaborasi dan peran antar aktor dalam pengembangan Desa Wisata Balong.

8. Swasta Mendanai

Pihak swasta dalam konteks ini dapat berfungsi sebagai investor atau penyedia dana untuk pengembangan fasilitas pariwisata, seperti akomodasi, fasilitas publik, atau infrastruktur lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan daya tarik desa wisata. Sektor swasta dapat memberikan sumbangan yang signifikan melalui kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat lokal dalam menciptakan produk wisata yang menarik dan berkelanjutan.

1.8.4 Jenis Data

Data dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kualitatif dan kuantitatif (Firmansyah et al., 2021). Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data kualitatif, berupa rangkaian kalimat tertulis yang memberikan penjelasan atau gambaran mendetail mengenai penerapan proses kolaborasi dalam pengelolaan dan

pengembangan Desa Wisata Balong. Data ini mencakup hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi terkait dinamika kolaborasi antar pemangku kepentingan, hambatan yang dihadapi, dan strategi yang diterapkan dalam pengembangan desa wisata.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui berbagai metode yang relevan dengan studi mengenai Proses Kolaborasi dalam Pengembangan Desa Wisata Balong.

1. Data Primer

Menurut Hasan (2002), data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui metode pengumpulan data di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di Desa Wisata Balong, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Wawancara dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengelola desa wisata, pemerintah daerah, perwakilan masyarakat, serta pelaku usaha yang terlibat dalam sektor pariwisata. Data ini bertujuan untuk memahami dinamika tata kelola kolaboratif, kendala yang dihadapi, serta peluang pengembangan desa wisata di Balong.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber tidak langsung, seperti dokumen resmi, laporan pemerintah, jurnal akademik, berita, serta berbagai publikasi lainnya (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari beberapa sumber,

termasuk regulasi terkait pariwisata di Kabupaten Blora, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, laporan statistik jumlah wisatawan, serta artikel berita dari portal informasi pariwisata yang membahas perkembangan dan hambatan Desa Wisata Balong. Selain itu, data juga dikumpulkan dari publikasi akademik dan studi terdahulu yang relevan dengan konsep kolaborasi dalam pengelolaan desa wisata.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019), teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai setting, sumber, dan metode. Jika dilihat dari segi metode, data dapat dikumpulkan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi, atau kombinasi beberapa teknik yang dikenal sebagai triangulasi. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah triangulasi, yaitu pendekatan yang mengombinasikan berbagai teknik pengumpulan data guna memastikan validitas dan konsistensi informasi yang diperoleh. Adapun teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara digunakan untuk menggali informasi mendalam terkait tata kelola desa wisata, hambatan dalam pengembangan destinasi wisata, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Balong. Menurut Sugiyono (2019), wawancara dalam penelitian kualitatif umumnya bersifat tidak terstruktur atau semi terstruktur. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi terstruktur, di mana daftar pertanyaan telah

disusun sebelumnya untuk memastikan keterfokusan pada topik penelitian, namun tetap memberikan fleksibilitas bagi informan untuk mengungkapkan pandangan mereka secara lebih luas. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pengelola desa wisata, pemerintah daerah, masyarakat setempat, serta pelaku usaha yang terlibat dalam sektor pariwisata di Desa Balong.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis, baik dalam bentuk laporan, kebijakan, maupun rekaman audiovisual (Sugiyono, 2019). Dokumentasi dalam penelitian ini mencakup berbagai sumber sekunder, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, laporan statistik kunjungan wisatawan, dokumen kebijakan terkait pengembangan desa wisata, serta artikel berita dari portal informasi pariwisata yang relevan dengan Desa Wisata Balong. Selain itu, dokumentasi juga meliputi hasil observasi lapangan berupa foto atau rekaman video untuk mendukung analisis lebih lanjut mengenai kondisi desa wisata serta permasalahan yang dihadapi dalam implementasi proses kolaborasi.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (dalam Sugiyono, 2019), analisis data kualitatif merupakan proses yang berlangsung secara interaktif dan terus-menerus hingga data mencapai titik kejenuhan. Proses analisis bertujuan untuk mengorganisasi data agar dapat ditafsirkan secara mendalam, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

Analisis dilakukan melalui tiga alur utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap ini memungkinkan peneliti memfokuskan perhatian pada data yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, kondensasi data dilakukan dengan mengelompokkan informasi mengenai hambatan tata kelola desa wisata, peran aktor kunci (pemerintah desa, Pokdarwis, masyarakat, dan sektor swasta), serta faktor-faktor yang melemahkan kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Balong.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data bertujuan untuk menyusun informasi yang telah terkondensasi ke dalam bentuk yang terstruktur sehingga memudahkan penarikan makna. Data dapat ditampilkan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, matriks, bagan, maupun model interaktif. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan melalui uraian mendalam mengenai kondisi objektif Desa Wisata Balong, dinamika interaksi antar pemangku kepentingan, serta hambatan yang muncul dalam implementasi tata kelola kolaboratif. Penyajian data yang sistematis ini memberikan dasar yang kuat untuk mengidentifikasi hubungan antarfaktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau stagnasi desa wisata.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion*)

Drawing/Verification)

Tahap akhir analisis adalah menarik kesimpulan yang valid dan melakukan verifikasi atas temuan penelitian. Kesimpulan tidak hanya berupa ringkasan, tetapi juga interpretasi yang menjelaskan makna data dalam kerangka teori tata kelola kolaboratif. Dalam penelitian ini, kesimpulan diarahkan untuk menilai efektivitas proses kolaborasi di Desa Wisata Balong, mengidentifikasi faktor dominan yang menghambat kolaborasi, serta menilai implikasinya terhadap pengembangan desa wisata. Validitas kesimpulan diperkuat melalui teknik triangulasi sumber dan metode, serta konfirmasi hasil kepada informan, sehingga interpretasi yang dihasilkan mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

1.8.8 Kualitas Data

Dalam penelitian kualitatif, validitas data dapat tercapai apabila hasil penelitian mampu merepresentasikan kondisi nyata yang ada di lapangan tanpa menimbulkan perbedaan yang berarti (Sugiyono, 2019). Untuk menjamin tingkat keabsahan tersebut, diperlukan teknik pemeriksaan data yang mampu memperkaya temuan sekaligus meminimalisasi bias peneliti. Salah satu teknik yang banyak digunakan adalah triangulasi, yaitu upaya menguji kebenaran data dengan memanfaatkan beragam sudut pandang. Denzin (1978) menyebut triangulasi sebagai strategi untuk meningkatkan validitas penelitian melalui kombinasi sumber, metode, peneliti, maupun teori. Sejalan dengan itu, Patton (1999) menegaskan bahwa triangulasi berfungsi membandingkan serta memverifikasi informasi dari berbagai perspektif, sedangkan Moleong (2019) mendefinisikannya sebagai teknik pemeriksaan dengan menggunakan informasi di luar data utama sebagai bahan pembanding.

Untuk memastikan akurasi dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber, yaitu menguji validitas data dengan mengumpulkan informasi dari berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Balong, meliputi pengelola desa wisata, pemerintah daerah, masyarakat setempat, serta pelaku usaha di sektor pariwisata. Selain itu, data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan statistik, dan publikasi akademik yang relevan. Pendekatan ini dipilih untuk menghasilkan data yang lebih aktual, kredibel, dan valid, sehingga temuan penelitian mampu memberikan gambaran nyata mengenai hambatan tata kelola, efektivitas kolaborasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan Desa Wisata Balong.